

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN TANA TORAJA

Putri Sahni S Haruna^{1*}, Mappamiring Mappamiring², Muh Yusuf³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstrak

This study aims to find out how the role of the Social Service in Poverty Alleviation in Tana Toraja Regency. Data collection techniques were carried out using source, method and time triangulation. Selection of informants based on the view of the author that the informant has knowledge, and the informant knows the problem the author is researching. The results of this study indicate that the role of the Social Service in poverty alleviation in Tana Toraja Regency is seen from the aspect of being a Regulator, Dynamist and Facilitator in the Poverty Overcoming Program the government has made great efforts to participate in programs for the poor in Tana Toraja, the government has also participated in data collection to the distribution of social assistance to the Social Service facilitating providing services to the poor but the Social Service government has not played an active role.

Keywords: government role, poverty, public policy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan agar mengetahui bagaimana Peran Dinas Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan menggunakan Triangulasi Sumber, Metode dan Waktu. Pemilihan Informan berdasarkan pandangan dari penulis bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan, dan informan tersebut mengetahui masalah yang penulis teliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Dinas Sosial dalam Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja di lihat dari aspek sebagai Regulator, Dinamisator dan Fasilitator dalam program mengatasi Kemiskinan pemerintah sudah sangat mengupayakan Berperan serta dalam program untuk masyarakat miskin di Tana Toraja, pemerintah juga sudah berpartisipasi dalam pendataan hingga penyaluran bantuan sosial hingga Dinas Sosial memfasilitasi memberikan pelayanan kepada Masyarakat miskin tetapi pemerintah Dinas Sosial belum berperan aktif di dalam Upaya yang di lakukan sehingga masih ada ketidak puasan yang di rasakan masyarakat kepada pemerintah Dinas Sosial.

Kata kunci: peran pemerintah, kemiskinan, kebijakan publik

* putri@gmail.com

PENDAHULUAN

Kemiskinan ialah masalah utama negara pembangunan termasuk negara Indonesia, dimana penanggulangannya perlu dilakukan dengan serius, kreatif, menyeluruh dan berkesinambungan. Masalah kemiskinan merupakan permasalahan serius yang sampai saat ini sedang dihadapi dan ditanggulangi oleh wilayah perkotaan (Nurwati, 2008). Terbentuknya kemiskinan Serta permasalahan sosial disebabkan oleh faktor internal serta faktor eksternal (Putra & Sudibia, 2017). Faktor internal ialah ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar setiap saat, ketidak mampuan dalam menangani permasalahan sosial yang dihadapinya. kemudian Faktor Eksternal ialah kebijakan public yang belum berpihak pada warga miskin, belum tersedianya pelayanan sosial, kesenjangan serta ketidakadilan. kemiskinan ialah suatu Permasalahan sosial mendasar serta begitu banyak akibat yang ditimbulkan. Kemiskinan dapat menimbulkan lemahnya moral serta etika pelanggaran Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Anarkisme, dan Mudah masuknya pandangan hidup, tidak hanya Pancasila. Oleh sebab itu, masalah kemiskinan adalah masalah yang wajib segera dituntaskan oleh negara Indonesia.

Konsep kemiskinan yaitu acuan tersendiri yang merupakan permasalahan yang belum terselesaikan di karenakan menyangkut kondisi seseorang yang dapat di katakana tidak mampu. Fenomena kemiskinan sudah banyak sekali di jumpai di beberapa kehidupan masyarakat, bahkan sudah menjadi isu yang muncul di daerah terpencil. Kemiskinan seringkali dikatakan sebagai permasalahan dari berbagai segi yang dimana lebih menyangkut gejala rendahnya kesejahteraan pada kehidupan seseorang (Desmawan et al., 2021). berbagai macam cara yang telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan, akan tetapi, menurut data statistik tingkat kemiskinan semakin meningkat dan sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Ciri-ciri kemiskinan secara umum ada dua jenis kemiskinan yaitu kemiskinan karena tidak dapat memenuhi kebutuhan Pangan dan Kemiskinan karena tidak dapat memenuhi kebutuhan Non Pangan (Rusliadi et al., 2023). Sesuai dengan defenisi tersebut kemiskinan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1) sulit memenuhi kebutuhan primer salah satu yang identik dengan kemiskinan yaitu sulitnya dalam memenuhi kebutuhan Primer, kebutuhan ini menjadi penentu masyarakat dalam memperoleh sandang dan pangan . bagi masyarakat yang tidak

dapat memenuhi kebutuhan primer sudah dapat di katakan sebagai masyarakat miskin. sebenarnya faktor ini sudah sedikit, 2) Sulit Mengelola SDA karena Minimnya SDM. Kabupaten Tana Toraja kaya akan sumber daya alam, tetapi karena keterampilan dan pengetahuan yang minim mengakibatkan masyarakat mengalami kemiskinan. kesulitan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam sebagai sumber kekayaan dari alam menjadi salah satu ciri kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2020 yaitu mencapai 12,10% dan kemudian di tahun 2021 presentase penduduk miskin mengalami peningkatan hingga mencapai 12,27% dan pada tahun 2022 presentase kemiskinan Kembali menurun sebanyak 12,18% meskipun angka kemiskinan di kabupaten Tana Toraja naik turun tetapi pemerintah Dinas Sosial tetap tidak berhenti mengupayakan dalam mengatasi angka kemiskinan di kabupaten Tana Toraja.

Berdasarkan undang-undang Nomor 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah keadaan individua atau kelompok yang ekonominya tidak terpenuhi atas hak-hak dalam mempertahankan kehidupan yang lebih baik.

Tana Toraja merupakan satu Kabupaten yang memiliki tingkat

kemiskinan di atas garis kemiskinan kabupaten dan kota. bermacam-macam Langkah dan strategi pemerintah daerah mendukung upaya penanggulangan kemiskinan tersebut melewati campur tangan program atau kegiatan secara menyatu melalui Lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat. terkhususnya pada Kabupaten Tana Toraja program penanganan masyarakat tidak mampu di lakukan menggunakan berbagai cara dengan strategi yang telah di rancang agar meminimalisir berkembangnya permasalahan sesuai dengan peraturan Bupati Tanah Toraja No.8 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Sejahtra (RASTRA) Kabupaten Tanah Toraja Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Tanah Toraja No. 06 tahun 2019 Tentang Tata cara pembagian dan penetapan Rincian dana Desa setiap lembang Kabupaten Tanah Toraja Tahun Anggaran 2019 . Maka dari itu Sangat Perlu adanya bantuan untuk keluarga yang kurang mampu.

Adapun upaya yang telah di terapkan dinas sosial dalam mengatasi Kemiskinan di Tana Toraja yaitu dengan adanya Penanggulangan kemiskinan yang hendaknya tidak boleh mengandalkan pemberian langsung seperti memberikan bantuan dana, raskin dan semacamnya , akan tetapi harus lebih mengutamakan faktor produktif yang pas pada

sasarannya. beberapa program bantuan yang telah di upayakan Pemerintah Dinas sosial untuk mengatasi kemiskinan di tana toraja meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Penerima Bantuan Iuran (PBI) Dan yang terakhir Bantuan BBM. semenjak adanya program tersebut memang dapat mengurangi angka kemiskinan yang terdapat di Kabupaten Tanah Toraja namun belum sesuai dengan target yang ingin di capai sebab pengawasannya yang kurang maksimal sehingga pemberian bantuan di bagikan Secara tidak Menyeluruh dan tidak Merata , perihal ini dapat di ketahui terdapat adanya keluarga yang kurang mampu tidak mendapat bantuan dari program yang di keluarkan oleh pemerintah serta masih belum pas pada sasaran semacam Masyarakat yang seharusnya membutuhkan Bansos justru tidak mendapatkan , sedangkan masyarakat yang tidak terlalu membutuhkan Bansos tersebut justru mendapatkan Bansos.

Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja sudah melakukan program tersebut dengan tujuan agar berkurangnya angka kemiskinan, program tersebut seperti memberikan bantuan baik yang bersifat bermanfaat dalam perihal ini yang masih sanggup bekerja ataupun untuk masyarakat yang tidak sanggup bekerja.

permasalahan program yang di lakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja belum pas pada sarasannya antar lain sebab pemerintah masih memakai daftar penduduk yang lama karena data yang diambil BPK pada badan statistic nasional di update setiap 10 tahun sekali. tidak hanya itu, Nama asli Masyarakat toraja yang identic menggunakan tanda Koma di atas sehingga tidak bisa terbaca oleh sistem, selain itu masyarakat yang sudah rentang yang mempunyai kendala dalam pengurusan administrasi, dan yang terakhir terdapatnya keakraban ikatan antara kader yang mendata dengan warga adalah salah satu pemicu bantuan sosial tidak pas pada sarasannyadan . dalam perihal ini petugas hendak menjadikan warga yang mempunyai ikatan dekat dengan mereka yang selaku kader pemberdayaan warga serta mengabaikan warga yang kurang sanggup yang seharusnya menjadi penerima bantuan sosial.

Teori peran (*role theory*) mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam satu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relative bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut.

Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungan. Peran memiliki arti perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status. Sehingga peran mempunyai suatu status. Sehingga peran mempunyai kaitan yang erat dengan status, karena didalamnya terdapat aspek-aspek yang dinamis dari status, yaitu seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban.

Sedangkan yang di kemukakan oleh Poerwodarminta (1995) “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat Poerwodarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: “Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh seorang yang berkedudukan dalam masyarakat”.

Menurut Soekanto, “peranan lebih banyak menunjukkan suatu fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.” Dalam peran ada 3 hal yang mencangkup didalamnya: 1) Meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, 2) Suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, 3) Sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.

Daerah otonom adalah daerah di dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan otonom, atau kebebasan dari pemerintah di luar daerah tersebut. Biasanya suatu daerah diberi sistem ini karena keadaan geografinya yang unik atau penduduknya merupakan minoritas negara tersebut, sehingga diperlukan hukum-hukum yang khusus, yang hanya cocok diterapkan untuk daerah tersebut. Menurut jenisnya, daerah otonom dapat berupa otonomi teritorial, otonomi kebudayaan, dan otonomi lokal. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

(Pasal 1 ayat (6), UU No.23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah).

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah mengatur mengenai Dinas yaitu: 1) Dinas Daerah melakukan unsur pelaksana otonomi daerah, 2) Dinas Daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah, 3) Kepala Dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Kemandirian masyarakat adalah wujud dari sebuah pengembangan kemampuan ekonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan dan memperbaiki material secara adil dan merata yang ujungnya berpangkal pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sendiri berdiri pada satu pemikiran bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakatnya.

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yakni mengarahkan masyarakatnya pada kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran didalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini,

pemberdayaan masyarakat berarti tidak bisa dilepaskan dan diserahkan begitu saja kepada masyarakat yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat yang optimal agar mampu memberdayakan diri menjadi lebih baik harus dengan terlibatnya pemerintah secara optimal dan mendalam.

Dengan berbagai interpretasi yang bervariasi, saat ini hampir semua Departemen maupun Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) memiliki program pemberdayaan masyarakat sebagaimana terefleksi dalam Renstranya masing-masing. Demikian juga di daerah, hampir semua Dinas/Instansi juga memiliki program yang serupa. Beberapa daerah bahkan membentuk unit kerja otonom untuk mengawal proses koordinasi yang lebih baik dan menjamin terlaksananya pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dibawah Gubernur/Bupati/Walikota yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM).

Ada empat jenis Bantuan Sosial: 1) Bantuan dan pelayanan kesejahteraan sosial, Merupakan bantuan golongan masyarakat miskin yang di berikan melalui Lembaga Kelompok Usaha Bersama (KUBE), 2) Bantuan dana, bantuan ini berupa kupon makanan ataupun dana cash agar dapat memenuhi biaya hidup, 3) Bantuan subsidi , bantuan

ini di khususkan untuk masyarakat yang mengalami kehilangan mata pencaharian yang diakibatkan oleh bencana alam, 4) Bantuan kompensasi, bantuan kompensasi ini diberikan oleh pemerintah subsidi, bantuan ini diberikan kepada korban pengusuran.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dimana data yang di ambil berdasarkan permasalahan yang ada dilapangan yang terjadi secara sistematis dan akurat (Abdussamad & Sik, 2021; Rahardjo, 2011). Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja dalam Mengatasi Kemiskinan.

Pada saat pengumpulan data berlangsung barulah Teknik analisis data dilakukan (Maulida, 2020). Dalam menganalisi data yang digunakan penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dalam analisi data kualitatif yang terjadi secara terus menerus sampai selesai sehingga data yang telah di peroleh sudah jenuh. Proses datanya yakni melalui : 1) *Data reduction* (redaksi data) yaitu merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data

untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan, 2) *Data display* (penyajian data) yaitu kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk naratif, tabel, dan began yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang di pilih kemudian di sajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan, 3) *onclusion drawing/ verification* (menarik kesimpulan) yaitu mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin alur sebab akibat dan proposisi. penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan dilapangan sehingga data-data dapat diuji validasinya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) wawancara merupakan Teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode interview, disitulah peneliti, informan, dan responden bertatapapan langsung untuk mendapatkan informasi agar data yang di dapatkan itu jelas, 2) observasi dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian terhadap pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi dan difokuskan pada pengamatan langsung terhadap masalah yang diteliti, 3) dokumentasi teknik pengumpulan data

yang dilakukan dengan cara meneliti data, dokumen pribadi dan dokumen resmi yang relevan dengan permasalahan penelitian. dengan Teknik ini akan mengumpulkan data yang diperoleh dari narasumber tetapi terdapat pula berbagai sumber lainnya berupa tulisan yang berkaitan dengan penelitian berupa buku yang menjadi konsepsi dan teori yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian, sumber pada laporan buku, skripsi, dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Hasil dari penelitian di lapangan mengenai Peran Dinas Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja dalam hal ini dapat dikaitkan dengan 3 indikator yang dikemukakan oleh Yusuf yaitu: Pemerintah Sebagai Regulator Dinamisator dan Fasilitator.

Regulator

Pemerintah tana Toraja Telah mengupayakan Kebijakan-kebijakan Melalui Program Bantuan Sosial agar dapat di hidup dengan layak seperti masyarakat lain yang mampu. Pemerintah Dinas Sosial sebagai Regulator sudah melaksanakan tugasnya dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja

dengan melakukan berbagai macam kebijakan melalui beberapa Program sehingga Strategi Dinas Sosial Sebagai Regulator dapat Maksimal dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja strategi Dinas Sosial sebagai regulator sudah di upayakan oleh pemerintah melalui Program-program yang telah dijalankan, Tentunya pemerintah sangat berusaha agar strategi yang di lakukan ini bisa mendapatkan hasil yang baik sehingga program yang sudah di laksanakan dapat dapat mencapai tujuan yaitu mengatasi Angka Kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja. pemerintah Dinas Sosial memang memberikan masyarakat bantuan sosial melalui pendataan. masyarakat yang menerima bantuan juga tidak langsung menerima saja tetapi ada banyak syarat yang harus di penuhi agar bantuan yang di berikan dinas sosial dapat di pergunakan dengan semestinya. pemerintah Dinas Sosial memang memberikan masyarakat bantuan sosial melalui pendataan. masyarakat yang menerima bantuan juga tidak langsung menerima saja tetapi ada banyak syarat yang harus di penuhi agar bantuan yang di berikan dinas sosial dapat dipergunakan dengan semestinya

Pemerintah sebagai regulator adalah untuk menyeimbangkan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dalam tahap penerbitan

peraturan-peraturan agar lebih efektif. sebagai regulator, pemerintah diharapkan dapat memberikan panutan dan dapat memberikan kebijakan dasar kepada masyarakat agar dapat mengatur semua kegiatan pemberdayaan. Yang menjadi kaitannya dengan Peran Dinas Sosial dalam Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja yaitu pemerintah Dapat memberikan kebijakan-kebijakan kepada masyarakat sesuai indikator sebagai Regulator.

Kemudian Hasil Kesimpulan keseluruhan dari beberapa Wawancara di atas, penulis dapat menarik bahwa Pemerintah Dinas Sosial Tana Toraja Sudah sangat berusaha semaksimal mungkin dalam mengupayakan mengatasi angka kemiskinan di kabupaten tana toraja dengan melakukan berbagaimacam kebijakan-kebijakan yaitu dalam bentuk Program-program bantuan untuk masyarakat kabupaten tana toraja agar masyarakat tana toraja.

Dinamisator

Peran Pemerintah sebagai dinamisator merupakan bentuk dari membangkitkan partisipasi kepada masyarakat Ketika terjadi masalah dalam proses pembangunan untuk memajukan serta mendukung dinamika pembangunan daerah. sebagai dinamisator di harapkan Dinas Sosial dapat mengajak Masyarakat

untuk berpartisipasi dalam penyiapan dan pelaksanaan program atau kebijakan dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja agar program yang di jalankan dapat berjalan secara insentif dan efektif.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dari seluruh informan di atas dapat penulis simpukan bahwa pemerintah dinas sosial Tana Toraja telah mengupayakan berbagaimacam partisipasi agar masyarakat dapat menerima bantuan sosial dengan layak dan merata tetapi masih ada ketidakpuasan yang di rasakan masyarakat kurang mampu di karenakan upaya yang di lakukan pemerintah dinsos masih belum optimal sehingga masih ada masyarakat yang seharusnya menerima tetapi tidak menerima bantuan.

Fasilitator

Peran pemerintah sebagai Fasilitator yaitu pemerintah yang mendukung dan menyediakan kondisi yang ideal (Cocok) agar pembangunan daerah dapat berjalan lancar. kaitannya dengan Peran pemerintah dalam Pengentasan Kemiskinan di Tana Toraja ini dapat yaitu dapat mewujudkan dengan cara memperhatikan indikator sebagai Fasilitator. pemerintah Dinas Sosial telah mengupayakan memberikan Fasilitas kepada masyarakat dengan cara terjun

langsung di lokasi nya sehingga masyarakat tidak perlu lagi untuk mengeluarkan biaya transportasi untuk ke kota mengambil bantuan tersebut. Dari hasil wawancara dengan seluruh informan di atas dapat penulis simpulkan bahwa pemerintah Dinas Sosial sudah sangat mengupayakan mulai dari pendataan hingga penyaluran bantuan sosial agar bantuan dapat merata dan tepat pada sasaran tetapi masih ada ketidak puasan yang di rasakan masyarakat (Kecemburuan Sosial) dikarenakan menurut masyarakat masih banyak masyarakat yang mampu tetapi mendapatkan bantuan sedangkan masyarakat tidak mampu justru tidak mendapatkan bantuannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil penelitian yang di lakukan di Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan mengenai Peran Dinas Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja , maka dapat penulis simpulkan bahwa hasil penelitian tersebut sebagai berikut : (1) Peran Dinas Sosial sebagai Regulator dalam Pengentasan Kemiskinan, Dinas Sosial Tana Toraja Memberikan Upaya untuk masyarakat miskin dalam mengatasi kemiskinan melalui Program-program bantuan sehingga program bantuan tersebut dapat membantu

masyarakat miskin yang ada di kabupaten Tana Toraja. (2) Peran Dinas Sosial sebagai Dinamisator dalam mengatasi kemiskinan yaitu dalam bentuk mengajak masyarakat melalui sosialisasi yang di buat dengan harapan masyarakat dapat turut serta membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Tana Toraja . (3) Peran dinas Sosial sebagai fasilitator dalam mengatasi Kemiskinan banyak upaya yang telah Dinas Sosial lakukan dalam memberikan Fasilitas terhadap masyarakat mulai dari pendataan hingga penyaluran tetapi masih ada kecemburuan sosial yang di rasakan masyarakat karena kedekatan antara pendata dan yang di data cukup sekat sehingga dalam proses penyaluran bantuan masih belum tepat pada sasarannya.

Berdasarkan Hasil Penelitian yang di lakukan di Kabupaten Tana Toraja, maka dapat di berikan saran terhadap hasil penelitian ini yaitu: Pemerintah dinas sosial di harapkan dapat memperhatikan Kembali cara pendataan agar pendataan untuk masyarakat miskin dapat tepat pada sasarannya dalam hal penyaluran bantuan. Dinas Sosial juga perlu bekerja sama dengan instansi terkait seperti Lembang, Kelurahan dan Kecamatan dan betul-betul melibatkan diri menentukan mana saja yang seharusnya mendapatkan bantuan dan

mana yang tidak dan tidak mengutamakan keluarga di karenakan hal-hal tersebut dapat menghambat misi dalam mengatasi Kemiskinan di Tana Toraja.

REFERENSI

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Desmawan, D., Syaifudin, R., Nistia, T., Mamola, R., Haya, H., & Indriyani, D. (2021). *Faktor Dominan Relativitas Kemiskinan*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Maulida, M. (2020). Teknik Pengumpulan Data Dalam Metodologi Penelitian. *Darussalam*, 21(2).
- Nurwati, N. (2008). Kemiskinan: Model pengukuran, permasalahan dan alternatif kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran* 10(1). <http://journal.unpad.ac.id/kependudukan/article/view/doc1>
- Putra, I., & Sudibia, I. K. (2017). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Bali: E-Jurnal EP Unud*, 9(10). ojs.unud.ac.id.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/ee/article/download/63648/36830>
- Rahardjo, M. (2011). *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif* (Bahan Ajar, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang).
- Rusliadi, R., Widianingsih, I., & Buchari, R. A. (2023). Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Takalar Regency. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 13(1), p. 359. <https://doi.org/10.26858/jiap.v13i1.47257>